

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal. Periode penelitian dalam penelitian ini yaitu 2009 dan 2010 dengan sampel penelitian yaitu laporan realisasi pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:.

1. Pendapatan asli daerah negatif berpengaruh terhadap alokasi belanja modal hal ini ditunjukkan oleh analisis regresi linier berganda tetapi dalam uji parsial variabel ini hanya memiliki $t_{hitung} = -1,502$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,139 , hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal tetapi memiliki pengaruh yang sangat kecil. Karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah sementara beban untuk belanja lainnya semakin meningkat membuat pemerintah harus memprioritaskan belanja operasional dibandingkan belanja modal. Hal ini yang mengakibatkan pendapatan asli daerah tidak menjadi salah satu faktor yang penentu untuk alokasi belanja modal.
2. Pinjaman daerah memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap alokasi belanja modal dengan $t_{hitung} = 2,186$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,033.

Hal ini dapat dijelaskan karena meningkatnya tambahan pembiayaan aset dari pinjaman daerah dapat mempermudah alokasi anggaran pemerintah daerah yang mana akan meningkatkan alokasi belanja modal.

3. Luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal hal ini dapat ditunjukkan oleh analisis regresi linier berganda, tetapi dalam uji parsial variabel ini hanya memiliki $t_{hitung} = 1,485$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,143, hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah mempengaruhi belanja modal tetapi memiliki pengaruh yang sangat kecil. Masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan kebijakan tata ruang yang dapat dimanfaatkan untuk investasi. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa daerah yang memiliki luas wilayah yang besar belum tentu memaksimalkan potensi pembangunan di daerahnya sehingga luas wilayah bukan merupakan penentu dari anggaran untuk alokasi belanja modal.
4. Secara simultan pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dan luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Variabel-variabel independen yang diajukan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah mampu menjelaskan variabel dependen yaitu belanja modal sebesar 14,4%. Sedangkan sisanya sebesar 85,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Sampel yang tersedia hanya 28 pemerintah daerah kabupaten dan kota dari 509 kabupaten dan kota. Hal ini dikarena penelitian ini memiliki variabel pinjaman daerah yang mana tidak semua kabupaten dan kota memilih pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaannya. Penelitian ini hanya dapat berfokus pada daerah yang memiliki pinjaman dalam suatu daerah, sehingga tidak mencakup seluruh populasi di Indonesia. Selain itu penambahan tahun membuat peneliti mengurangi jumlah sampel karena daerah yang memiliki pinjaman daerah berturut-turut selama dua tahun sangatlah terbatas.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

- a. Bagi peneliti berikutnya:
 1. Peneliti selanjutnya diharapkan memfokuskan pada daerah yang sebagian besar kabupaten dan kotanya melakukan pinjaman daerah.
 2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variable lain dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dan tidak berfokus pada variable pinjaman daerah.
 3. Peneliti selanjutnya dapat mengurangi jangka waktu penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang lebih mencerminkan keseluruhan populasi di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah:

Diharapkan pemerintah memperhatikan alokasi untuk belanja modal yang mana akan memberikan manfaat untuk meningkatkan taraf perekonomian dari daerah itu sendiri sehingga dapat memajukan perekonomian daerah. Selain itu diharapkan pemerintah pusat merealisasikan batas maksimal untuk belanja modal dan batas minimum untuk belanja pegawai sehingga tidak terjadi perbedaan yang sangat besar untuk belanja modal antara kabupaten atau kota yang satu dengan lainnya.